IMEIJ
Indo-MathEdu Intellectuals Journal

p-ISSN:2808 – 5604
e-ISSN: 2808 – 5078
Volume. 5, No. 6, 2024

PENERAPAN PROGRAM "MAKAN RENDANG" SEBAGAI STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR UNTUK MEMINIMALISIR KETERGANTUNGAN UMKM TERHADAP RENTENIR

Irma Febrilia[1], Rahmadhona Fitri Helmi[2]
[1, 2]Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: irmafebrilia08@gmail.com

Article History

Received: 30-10-2024

Revision: 09-11-2024

Accepted: 11-11-2024

Published: 12-11-2024

Abstract. This research aims to determine the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Rendang Eating Program for MSMEs as a flagship program for the Tanah Datar Regency Regional Government. In this research, the researcher used a qualitative descriptive method where the aim of this method was to describe things that happened according to the conditions when the research was carried out. Data collection techniques in this research are interviews and documentation. Data were analyzed using reduction techniques, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the implementation of the Rendang Eating Program has supporting factors, including First, the existence of clear regulations, with the latest legal basis, namely Regent's Regulation Number 1 of 2022. This regulation provides clear guidance and framework for all parties involved, including local government, KUKMP Service, Bank Nagari and Community. Second, full support from regional governments can also be seen through adequate budget allocation and good coordination between agencies. The inhibiting factors include First, there are still many people involved in BI-Cheking which causes these people to not be able to take advantage of the program. Second, the Rendang Meal Program has not been properly socialized to the public, so there are still many people who do not know about this program and the budget for the Rendang Meal Program itself has not been fully realized.

Keywords: Rendang Meal Program, Msmes, Loan Shark

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program makan rendang bagi UMKM sebagai program unggulan pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Program Makan Rendang terdapat faktor faktor pendukung diantaranya Pertama, adanya regulasi yang jelas, dengan dasar hukum terbaru yaitu Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan panduan dan kerangka kerja yang pasti bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, Dinas KUKMP, Bank Nagari dan Masyarakat. Kedua, dukungan penuh dari pemerintah daerah juga terlihat melalui pengalokasian anggaran yang memadai, dan koordinasi yang baik antar instansi. Adapun Faktor faktor penghambat meliputi Pertama, masih banyaknya dari masyarakat yang terlibat BI-*Cheking* yang menyebabkan masyarakat tersebut tidak dapat memanfaatkan program. Kedua, Program Makan Rendang belum tersosialisasi secara baik kepada masyarakat, sehingga masih banayak masyarakat yang belum mengetahui program ini dan anggaran dana dari Program Makan Rendang sendiripun belum terealisasi secara keseluruhan..

Kata Kunci: Program Makan Rendang, UMKM, Rentenir

How to Cite: Febrilia, I & Helmi, R. F. (2024). Penerapan Program "Makan Rendang" sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk Meminimalisir Ketergantungan UMKM Terhadap Rentenir. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (6), 6801-6817. http://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2079

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia yaitu, Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2023 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan DomestikBruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja. Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah mendaftarkan bisnisnya di platform OSS sudah mencapai 8,71 Juta unit. Yang tersebar di beberapa Provinsi salah satunya Sumatra Barat yang menjadi urutan ke 8 sebagai UMKM terbanyak dengan jumlah UMKM pada tahun 2022 sebanyak 296,052 unit. Kondisi UMKM di Sumatra Barat ini terus berkembang dengan upaya pemerintah yang berkolaborasi dengan kementerian keuangan untuk mempersiapkan produk-produk UMKM lokal menuju pasar global (UKMIndonesia.id 2023). Tanah Datar yang merupakan salah satu daerah yang Usaha Mikro Kecil dan Menengahnya juga cukup bayak yang mana tercatat ada 75.115 Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan berbagai jenis seperti usaha di bidang kuliner, Fashion, agrebisnis, Teknologi, otomotif, Perawatan Tubuh dan bidang kajia cendra mata (Koperindag Tanah Datar 2021).

Kabupaten Tanah Datar menunjukkan komitmen yang signifikan terhadap pengembangan sektor industri, mengingat mayoritas mata pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat berasal dari sektor tersebut. Hal ini tercermin dalam visi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar periode 2021-2026, yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan memperluas lapangan kerja melalui sektor pertanian, industri, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak hambatan atau halangan terhadap para pelaku UMKM di Indonesia rata-rata permasalahan utama adalah pembiayaan, pemasaran dan dukunganpemerintah (Hanggraeni, 2021). Berdasarkan studi yang dilakukan PwC pada tahun 2019, setidaknya 74 persen UMKM di Indonesia belum mendapat akses kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Padahal UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan nilai kontribusi pada PDB sebesar 61 persen serta penyerapan tenaga kerja mencapai 97%.

Mentri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak pelaku UMKM belum mendapatkan akseses permodalan dari pemerintah. Hal ini tercermin dari 5 Juta UMKM masih mengandalakan pinjaman dari rentenir dengan bunga tinggi (CNN Indonesia 2023). Dalam kehidupan masyarakat, praktek pinjam-meminjam uang sudah merupakan hal yang biasa terjadi baik melalui lembaga resmi yaitu seperti bank dan atau melalui perseorangan dan badan

yang melakukan usaha pemberian pinjaman uang di luar lembaga bank. Dalam tulisan ini yang dipermasalahkan hanyalah mengenai peminjaman uang dengan bunga yang diberikan oleh perseorangan atau diluar lembaga bank tanpa izin dari pihak yang berwenang, yang lazimnya disebut dengan "Praktek Rentenir" (Ahmad, 2019).

Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 memiliki sekitar 19.054 UMKM, 24% merupakan UMKM yang mengolah pngan dan makanan, dan selebihnya dari fesion, kerajian dan segaa macamnya dan sebagian besar UMKM Kabupaten Tanah Datar adalah usaha mikro. Dari Seluruh kelompok usaha ini tentu membutuhkan akses permodalan. Peluang inilah yacng ditangkap rentenir sehingga menjadi pemasukan bagi mereka dan masyarakat terjebak hanya dalam beban bunga. lebih kurang ada 30 orang rentenir yang meminjamkan uang kepada masyarakat di Tanah Datar khususnya sopir angkot, pedagang di pasar dan masyarakat di nagari-nagari (Yuletri, 2022).

Kelebihan meminjam dari rentenir adalah karena persyaratan yang mudah, kecepatan dalam pencairan dana, dan tidak adanya jaminan dalam bentuk apa pun. Keunggulan yang ditawarkan oleh rentenir menjadikan transaksi ini masih terus berkembang hingga sekarang dan membuat keberadaan lembaga keuangan lain seperti bank umum, bank swasta, termasuk lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro secara total belum mampu menghilangkan keberadaan transaksi rentenir di Indonesia. Masih diterimanya transaksi rentenir sebagai solusi permodalan oleh pedagang di pasar tradisional haruslah menjadi perhatian semua pihak. Pembiayaan permodalan melalui jasa rentenir ini hanyalah memberikan solusi untuk jangka pendek. Adanya kemudahan dalam mendapatkan modal namun, untuk jangka panjang pedagang dihadapkan pada bunga yang tinggi dari pinjaman dan akan menjerat kondisi keuangan mereka (Sabirin & Sukimin, 2017).

Melihat dampak yang sangat merugikan masyarakat terutama yang bergerak dalam UMKM, sebagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi jeratan rentenir yang menyebabkan masyarakat menjerit. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar meluncurkan "Program Makan Rendang*"* di Kabupaten Tanah Datar yang merupakan singkatan dari "Memaksimalkan Pemberantasan Rentenir Agar Hilang di Tanah Datar". Program ini sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Tanah datar dimana di maksud untuk mendukung peraturan gubernur Nomor 22 tahun 2022 tentang program unggul menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja pertahun. Program *Makan Rendang* ini *launching* pada tanggal 2 Maret 2022, berkerja sama dengan Bank Nagari dan di maksud untuk mendorong *recovery* atau pemulihan roda perekonomian di Kabupaten Tanah Datar. Dasar Hukum Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Makan Rendang ini adalah Surat Keputusan

Bupati Tanah Datar No. 500/196/PEREK DAN SDA-2021 tanggal 3 Juni 2021, tentang Pemmbentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Pemberian Subsidi Bunga dan atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro, Surat Bupati Tanah Datar No. 500/141/Pereko-SDA/2022 tanggal 8 Februari 2022, tentang Pelaksanaan Program Subsidi Bunga dan/atau Margin, serta Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kopreasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar dengan PT. Bank Nagari (Fauzan, 2022).

Program ini juga bertujuan meningkatkan nilai jual produksi dan jasa, mendapatkan pembiayaan yang cepat, mudah, murah bagi pelaku UMKM serta menyediakan modal dengan keringanan pembayaran bunga atau margin hadirnya Program Makan Rendang akan memberikan kemudahan, keleluasaan dan keuntungan kepada pelaku UMKM dan masyarakat yang memanfaatkannya. Para pelaku UMKM ataupun masyarakat bisa mendapatkan pinjaman tanpa syarat agunan tambahan, cukup dengan bukti memiliki usaha yang layak untuk dibiayai. (Putra, 2022). Pada program Makan Rendang ini, Bank Nagari Batusangkar memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM maksimal Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 24 Bulan dengan margin 2.77% tanpa agunan. Dana yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk Program ini sebanyak 18 miliar, akan tetapi yang tearalisasi sebanyak 1 miliar (Putra, 2022). Usaha mikro yang telah memanfaatkan program Makan Rendang sampai dengan akhir maret 2024 adalah sebanyak 161 usaha mikro dengan total pinjaman yang telah disalurkan oleh Bank Nagari lebih kurang 1,5 miliar rupiah. Hal ini mengidentifikasikan bahwa program ini masih kurang di minati oleh masyarakat terutama para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini mengindikasikan bahwa program tersebut belum optimal dalam mengurangi rentenir di Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi terkait perlu melakukan evaluasi dan perbaikan program tersebut untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengurangi rentenir dan meningkatkan perekonomian masyarajat di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program makan rendang bagi UMKM sebagai program unggulan pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulitatif dengan meotde deskriptif. Pendekatan kualitatif ini melibatkan pengamatan terhadap informan sebagai subjek penelitian dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Menurut (Sudaryono 2018),

pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif adalah upaya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata. Jenis dan sumber data adalah subjek asal data penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar dan Bank Nagari Syariah Batusangkat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan Program Makan Rendang Sebagai Strategi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Untuk Meminimalisir Ketergantungan UMKM Terhadap Rentenir

Sumberdaya

Menurut Metter dan Horn (2020) implementasi kebijakan harus didukung oleh sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia *(non-human resources).* Keberhasilan didalam proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Menurut Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa sumberdaya manusia menjadi faktor penghambat penerapan Program Makan Rendang, hal ini dilihat dari tidak adanya staf khusus yang turun kelapangan untuk melakukan survei pengawasan Program Makan rendang. sehingga program ini tidak berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ririn Listriana, SE selaku staf di Dinas KUKMP menyampaikan hal sebagai berikut:

> "...untuk staf khusus program Makan rendang ini tidak ada hanya saja kegiatan ini terletak di bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas KUKMP. Sehingga program ini menjadi tanggung jawab bersama..." (Wawancara 26 Agustus 2024).

Sejalan dengan pernyataan tersebut Wali Nagari Kecamatan Lima Kaum Bapak FT, juga menyampaikan terkait staf khusus dalam program Makan Redang sebagai berikut:

> "...saat ini belum ada staf khusus yang ditunjuk untuk memegang dan mengawasi secara langsung jalannya program makan rendang ini. Karna tidak adanya staf khusus ini maka dapat menyebabkan kekurangan dalam pengawasan dan evaluasi yang mendalam, yang berpotensi mengurangi efektivitas program. Resikonya manfaat dari program tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh semua UMKM yang membutuhkan modal di Kabupaten Tanah Datar..." (Wawancara 27 Agustus 2024).

Selanjutnya, Kepada Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar Bapak DI juga menyampaikan terkait sumberdaya sebagai berikut:

> "...partisipasi masyarakat pada program makan rendang ini sangat antusias, ada dari masyarakat yang sebelumnya memanfaatkan program ini melanjutkan kembali pemanfaatannya di tahun berikutnya, selagi itu memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Tapi banyak juga dari masyarakat yang belum bisa memanfaatkan program ini karna terkendala BI-*Cheching..."* (Wawancara 25 Agustus 2024).

Selain sumberdaya manusia sumberdaya non manusia juga sangat mempengarui jalannya pelaksanan pogram. Penjelasan tentang anggaraan program makan rendang di sampaiakan oleh Bapak DI sebagai berikut:

> "...dana yang di anggarkan oleh pemerintah untuk program ini adalah 18 miliar hingga juni 2024 sudah tercatat sebanyak 195 UMKM yang memanfaatkan program ini dengan total realisasinya kurang lebih 2 miliar..." (Wawancara 25 Agustus 2024).

Selain anggaran Bapak DI juga menjelaskan mengenai data penerimaan Program Makan Rendang yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. data penerima program makan rendang

Tahun	**Jumlah UMKM**	***Flafond***
2022	21 UMKM	Rp 154.500.000
2023	131 UMKM	Rp 1.175.500.000
2024	43 UMKM	Rp 398.000.000
Jumlah	**195 UMKM**	**Rp 1.728.000.000**

Melihat data tersebut pemanfaatan Program Makan Rendang ini masih kurang diminati oleh pelaku masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil di Kabupeten Tanah Datar dilihat dari tahun 2022 hanya dimanfaatkan oleh 21 unit UMKM dengan total anggaran sebesar Rp 154.500.000 dan pada tahun 2023 program ini mengalami kenaikan dari tahun sebelunya, yaitu dimanfaatkan oleh 131 unit UMKM dengan total anggaran sebesar Rp 1.175.500.000. Namun, pada 2024 pemanfaatan program ini mengalami penurunan lagi dari tahun sebelunya dengan jumlah pengusung sebanyak 195 UMKM dengan total anggran Rp. 398.000.000. Dan tercatat hingga Juni 2024 dana dari yang dianggarkan hanya terealisasi sebesar Rp 1.728.000.000. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2024, akan tetapi Program Makan Rendang ini sempat mengalami peningkatan dari tahun awal peluncuran program. Hal ini menunjukan adanya usaha yang berkelanjutan dari Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar untuk memperluas jangkauan Program Makan rendang ini sehingga lebih banyak UMKM yang dapat merasakan manfaatnya.

Berdasarkan wawancara peneliti mengenai sumberdaya menjadikan sumberdaya sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya sebuah implementasi program. Penghambat dari penerapan program dari indikator sumberdaya adalah masih rendahnya pengawasan pada pelaksanaan program ini, sehingga minat masyarakat untuk memanfaatkan program ini masih tergolong minim. Masih banyak dari masyarakat yang belum bisa maemanfaatkan program ini dan dana yang terealisasi pada program ini juga masih sedikit.

Standar dan Sarana Kebijakan

Program Makan Rendang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Tanah Datar apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan oleh Kepada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar Bapak DI sebagai berikut:

> "....semua UMKM dengan usaha produktif dan memiliki KTP Tanah Datar dan memiliki usaha di Kabupaten Tanah Datar bisa memanfaatkan Program Makan Rendang ini. Dan secara umum masyarakat yang paling banyak sebagai pengusung program makan rendang ini adalah di seputaran batusangkar yaitu kecamatan lima kaum. Karna kredit yang terealisi paling besar itu dari Bank Nagari Cabang Batusangkar, sementara kami juga melanyani dari Bank Nagari Syariah Batusangkar, Bank Nagari cabang Lintau dan Bank Nagari Cabang Padang Panjang..." (Wawancara 25 Agustus 2024).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa Program Makan Rendang ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Datar, selagi itu adalah penduduk asli yang memiliki KTP Tanah Datar dan memenuhi syarakat yang telah ditentukan. Umumnya pengusung terbanyak dari program ini adalah daerah Batusangkar yaitu Kecamatan Lima Kaum yang dibuktikan dari kredit yang terealisasi paling besar dari Bank Nagari Cabang Batusangkar. yang mana program ini merupakan bentuk implementasi Peraturan Bupati Nomor: 22 tahun 2021 tentang 'Roadmap pelaksanaan Program Unggulan dalam RPJMD tahun 2021 – 2026.

Untuk dasar pelaksanaan program Makan Rendang ini disampaikan oleh staf di Dinas KUKMP Ibu RL sebagai berikut:

> "...landasan kebijkan dari program Makan Rendang ini adalah peraturan bupati nomor Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Pemberian Subsidi Bunga dan atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro. Dan ada MoU dengan Bank Nagari serta PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Bank Nagari..." (Wawancara 26 Agustus 2022)

Untuk sarana kebijakan ini juga diperkuat dengan wawancara peneliti dengan Kepada Dinas KUKMP Tanah Datar Bapak HS sebagai berikut:

> "...program makan rendang ini dibuat oleh bupati kita yang didasarkan pada Perbup Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, dan juga surat bupati tanah datar tanggal 8 Februari 2022, tentang Pelaksanaan Program Subsidi Bunga atau Margin, serta Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kopreasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar dengan PT. Bank Nagari, untuk lama penyelengraan program ini dari tahun 2022 sampai tahun 2026 dan untuk jangka waktu pinjaman yang akan di manfaatkan oleh UMKM minimal selama 1 tahun dan Maksimal selama 2 tahun..." (Wawancara 26 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara peneliti diatas dapat di simpulkan bahwa jelas sasaran kebijakan dari Program Makan Rendang adalah UMKM yang berada di Kabupaten Tanah Datar terutama yang meminjam kepada rentenir. Guna untuk meminimalisir ketergantungan UMKM Terhadap rentenir dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Karateristik Organisasi Pelaksana

Pada Program Makan Rendang sangat dipengaruhi oleh organisasi pelaksana. Karakteristik organisasi pelaksana mencakup Standar Operasional Prosedur (SOP) program. Organisai Pelaksana tentunya memahami terkait aturan Program Makan Rendang mulai dari pengajuan hingga berjalannya program. Dalam pelaksanaan Program Makan Rendang, Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar dan PT. Bank Nagari selaku instansi yang berwenang atas penyelenggaran Program Makan Rendang, memiliki kewajiban yang ditunjuk untuk membantu pemerintah terhadap Hal ini seperti yang disampaikan oleh staf di Dinas KUKMP sebagai Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro Kecil dan Menengah Ibu RL sebagai berikut:

> "...untuk pelaksanaan kegiatan dalam program Makan Rendang ada beberapa istansi yang terlibat di dalamnya yaitu Dinas KUKMP Kabupaten tanah datar, yaitu bagian Hukum, bagian Perekonomian. dan bagian pemerintah kesekretariat daerah kabupaten Tanah Datar.Serta PT. Bank Nagari Syariah Batusangkar, Bank Nagari Cabang Batusangkar, Bank Nagari Cabang Lintau dan Bank Nagari Cabang Padang Panjang. Yang memiliki wewenang untuk menyeleksi penerima program. Peran para wali nagari di setiap kecamatan juga diperlukan dalam sosialisasi program ini karna wali nagari merupakan instansi yang lebih dekat dengan masyarakat." (Wawancara 26 Agustus 2024)

Selanjutnya, mengenai pendekatan pada masyarakat tentu diperlukan sosialisasi, pendataan dan pola komunikasi dengan masyarakat setempat, dengan itu intitusi terdekat dengan masyarakat terkait program Makan Rendang adalah Wali Nagari Kecamtan Lima Kaum berikut disampaikan oleh Bapak FT dengan peneliti:

> "...Kami pihak Nagari pada setiap kebijakan termasuk adanya Program Makan Rendang. Selalu mengenalkan program Makan Rendang ini kepada masyarakat melalui sosialisasi pada pelatihan-pelatihan yang ada di kantor Wali. Dan kami akan selalu meberikan informasi yang di berikan oleh pusat seperti dari bapak bupati sendiri, maupun Dinas KUKMP ke pada masyarakat baik itu secara langsung atau tidak langsung. Dan insya allah kita selalu menerima setiap keluhan dari masyarakat dan memberikan solusi untuk program Makan Rendang ini." (Wawancara 26 Agustus 2024)

Selain Wali Nagari, Ketersediaan dari PT. Bank Nagari sebagai aspek finansial dan dukungan kredit untuk menyelenggarakan Program Makan Rendang juga menjadi implementator Program Makan Rendang. berikut wawancara peneliti dengan ADM Pembiataan Bank Nagari Syariah Batusangkar Bapak Ziofky Pratama S.E sebagai berikut:

> "...Untuk terlaksananya program Makan Rendang, pemerintah kabupaten Tanah Datar terdapat beberapa kriteria yang harus di penuhi masyatakat, kriterianya merupakan pelaku usaha mikro yang menjalankan ekonomi produktif di sektor apa saja dan tidak sedang menerima fasilitas pinjaman dari lembaga lain, baik program ataupun non program dan pelaku berdomisili di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan untuk persyaratan berupa Foto Copy KTP Suami dan Istri, Foto Kopy Kartu Keluarga, Foto Kopy Surat Nikah, Pas Photo dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di keluarkan pemerintah". (Wawancara, 29 Agustus 2024)

Bedasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Program Makan Rendang melibatkan beberapa agen pelaksana seperti Dinas KUKMP, Bank Nagari, Wali Nagari dan UMKM. Karakteristik agen pelaksana tersebut, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Program Makan Rendang, di mana mereka bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, serta memastikan setiap tahap pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen pelaksana memiliki komitmen yang tinggi terhadap program ini, dengan menunjukkan dedikasi yang kuat dalam menjalankan tugas mereka, seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Komitmen ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan dan kelancaran Program Makan rendang di Kabupaten Tanah Datar.

Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi adalah kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kerjasama yang efektif dan pola komunikasi yang jelas antara berbagai pihak informan harus memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dengan baik. Dalam implementasi Program Makan Rendang dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan staf di Dinas KUKMP sebagai Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro Kecil dan Menengah Ibu RL sebagai berikut:

> "...untuk koordianasi dilakukan dengan berupa sosialisasi yang didilakukan langsung kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk kegiatan lapangan dinas, bimbingan teknis (bimtek), serta pelatihan. Sosialisasi ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan program Makan Rendang dan bagaiaman cara memanfatkan program ini mulai dengan pergi ke bank nagari terdekat dengan membawa sayarat dan bagaimana cara meminta surat izin usaha. Dengan cara ini, informasi dan pengetahuan mengenai kebijakan dapat disampaikan secara efektif dan mendalam kepada masyarakat..." (wawancara 26 Agustus 2024)

Hal ini juga didukung dengan wawancara peneliti bersama pihak Bank Nagari Syariah sebagai pemberi kredit dari Program Makan Rendang hal ini disampaikam Administrasi Pembiayaan Bank Nagari Syariah Batusangkar oleh Bapak ZP sebagai berikut:

> "...untuk komunikasi kami selalu menawarkan program ini kepada nasabah-nasabah kami, dan kamu juga melakukan promosi program ini disosial media seperti insagram serta kami juga pernah membuat benner untuk program ini. Dan dari pihak BN syariah pun juga melakukan koordinasi dengan dinas perdagangan dengan melakukan pertemuan ataupun melakukan evaluasi untuk mencari permasalahan dari program ini. Untuk saat ini masalah terbanyak dari pemanfaatan program ini yaitu banyak dari masyarakat yang terkena Bi*cheking*..." (Wawancara 29 Agustus 2024)

Selanjunya, berdasarkan wawancara peneliti dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah Perdagangan, karateristik organisasi pelaksana dan juga komunikasi anatar organisasi terkait pemanfaatan program juga menjadi faktor penghambat terlaksananya Program Makan Rendang Bapak DI selaku Kepada Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar menyampaikan pada kesempatan wawanacara dengan peneliti sebagai berikut:

> "...sosialisasi selalu kami berikan kepada masyarakat yang pertama pada awal program ini di luncurkan di laknakan oleh bagian perekonomian sekretariat daerah Kabupaten Tanah Datar ke beberpa kecamatan kemudian pada tahun 2023 dan 2024 kami sosialiasikan ke masing-masing kecamatan. Sosialisasi ini sudah 14 kali kami lakukan di setiap kecamata." (Wawancara 25 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa komunikasi didalam pencapaian informasi antara pelaksana program dan sasaran program harus memiliki kejelasan dan konsistensi. Jika dalam penyampaian komunikasi memiliki artian berbeda antar pelaksana dan sasaran, akan menimbulkan salah faham dan resiko dikemudian hari. Dalam temuan dilapangan tentang komunikasi antara fasilitator dengan implementator yaitu Dinas KUMP dan Bank Nagari dengan sasaran kebijakan program yaitu UMKM tidak bisa dikatakan tercapai, karena seharusnya seluruh seluruh UMKM yang membutuhkan bisa memanfaatkan program ini, sedangkan masih banyak UMKM yang belum bisa memanfaatkan program Program

Unggulan Makan rendang dari tahun 2022. Tercatat masih 195 UMKM yang memanfaatkan program ini. hal ini di karnaknan beberapa masalah yang di hadapi UMKM terutama Bi-*Cheking* dan belum ada solusi terkait ini selain membayarkan kredit macet yang di pinjam sebelumnya dan membersihkan nama selama 2 tahun. Dengan tidak adanya soslusi dari permasalahaan program ini membuat kebijakan masih masih terealisasi secara maksimal.

Sikap Para Pelaksana

Dukungan masyarakat merupakan bagian yang penting dalam implementasi kebijakan. Dukungan yang diberikan masyarakat berupa partisipasi masyarakat memanfaatkan program ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepada Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar Kepada Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar Bapak DI pada kesempatan wawancara dengan peneliti terkait partisipasi masyarakat sebagai berikut:

> "...partisipasi nampaknya sangat besar dari masyarakat banyak dari masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini tetapi terkendala karna pribadi masyarakat yang sudah terlibat dengan dengan kredit macet baik perbankan maupun toko-toko online. Bahkan ada dari UMKM yang memperpanjang pemanfaatan program ini. Itu bisa di lakukan selagi masyarakat tersebut tidak terkena Bi*cheking*..." (Wawancara 25 Agustus 2024)

Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Bapak Donni, terlihat bahwa masyarakat sangat antusias dalam pemenafaatan program ini. Namun, masih banyak dari masyarakat terkendala untuk memanfaatkan program ini karena terlibat dalam kredit macet yang dilakukan sebelumnya. Hal ini membuat Prongam Makan Rendang tidak terimplementasi dengan baik. sejalan yang diungkapkan oleh Ibu Vera Osiana selaku masyarakat dengan peneliti sebagai berikut:

> "...saya tahu dengan program "Makan Rendang" yang dibuat oleh bapak bupati kita. Saya sudah pernah mengurus untuk pemanfaatan program ini bahkan sudah 2 kali saya pergi ke bank nagri untuk mengajukan pinjaman namun pinjaman saya tidak diterima oleh bank karena katnya saya terlibat BIcheking dengan bank lain. sampai sekarang pun saya masih belum bisa untuk memanfaatkan program ini walaupun kredit saya sudah saya lunasi. seharusnya ada solusi dari pemerintah terkait permasalahan ini karna program ini karna program ini bagus untuk para UMKM seperti kami ..." (wawancara 19 Juli 2024)

Berdasarkan pernyataan Ibu VA terlihat masyarakat sangat antusias terhadap pemanfaatan Prongam Makan Rendang tentu alasannya program ini sangat menguntungkan masyarakat terutama untuk penambahan modal para pelaku UMKM. Namun, masyarakat masih banyak

yang terlibat kredit macet dan sampai hingga saat ini belum ada solusi yang diberikan oleh pemerintah terhadap kendala dari program ini sehingga program tidak terealisasi maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana terhadap Program Makan Rendang sangat positif. Para pelaksana menunjukkan antusiasme dan dedikasi tinggi dalam memanfaatkan program ini sikap positif ini dipengaruhi oleh pemahaman akan pentingnya program ini bagi kesejahteraan UMKM dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dukungan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan sumber daya, bantuan teknis, dan fasilitasi koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam program ini. Para pelaksana memahami bahwa program ini tidak hanya membantu UMKM dalam hal permodalan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendukung dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi kebijakan masyarakat harus sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Berikut wawancara peneliti dengan Ibu RL sebagai berikut:

> "...dampak langsung sosial dan ekonomi tentu pelaku usaha kita terutama pelaku usaha mikro merasa terbantu dalam pembiayaan modal udahanya dan bisa meminimalisir lepas dari jeratan rentenir karna itu merupakan tujuan utama program ini. Untuk dampak tidak langsung lingkungan sosial menjadi tidak khawatir lagi akan rentenir bagi pelaku usaha..." (wawanacara 26 Agustus 2024).

Sejalan dengan itu Kepada Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa Program Makan Rendang ini berhasil dari segi sosial, ekonomi tetapi dari segi politik program ini khawatir tidak dapat di lanjutkan sebagaimana wawancara dengan Bapak DI sebagai berikut:

> "...untuk dampak dari sosial dan ekonomi tentu masyarakat dapat terbantu untuk biaya permodalan terutama pelaku usaha mikro agar tidak terjerat kepada rentir baik secara tradisional maupun online. Namun untuk dampak politik program apakah masih terus dilanjutkan karna di pebgaruhi oleh pergantian kepemimpinan karna program makan rendang ini merupakan inisiatif dari bapak bupati. Yang mana nantinya setiap pemimpin baru memiliki prioritas yang berbeda. Tetapi perjajian kerja sama kita dengan bank nagari sampai tahun 2026..." (wawancara 25 Agustus 2024)

Berdasarakan penjelasan dari Bapak DI, terkait dampak sosial, ekonomi dan politik menjadi pendukung keberhasilan implementasi Program Makan Rendang karna masyarakat

yang memanfaatkan program ini merasa terbantu dengan adanya Program Makan Rendang tersebut. Peran pemerintah daerah dalam Program Makan Rendang bukan hanya berhenti ketika program ini selesai dengan perganrtian kepemimpinan. Pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai peran pengawasan implementasi kebijakan. Suatu kebijakan dapat diartikan berhasil saat tujuan akhir dari program tercapai dan masyarakat mendapatkan kebermanfaatan dari program itu. Namun, program yang diberi pemerintah tentu memiliki aturan dan regulasi hukum yang seharusnya jelas, agar dikemudian hari program ini tidak menimbulkan masalah yang merugikan berbagai pihak.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Program Makan Rendang Bagi UMKM

Faktor Pendukung

Berdasarkan wawancara dengan Kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Mengah dan Perdangangan (DKUKMP) Bapak HS:

> "...Faktor pendukung yang utama tentu adalah adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan program "Makan Rendang" ini. Regulasi tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas, sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Program ini didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Pemberian Subsidi Bunga dan atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro. Peraturan ini mengatur mekanisme pemberian subsidi bunga atau margin kepada pelaku usaha mikro, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian subsidi. Dan sasaran dari program ini adalah para pelaku UMKM yang memiliki KTP Kabupaten Tanah Datar yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh program "Makan Rendang" ini." (Waeancara 26 Agustus 2024)

Hal yang sama dengan penjelasan informan sebelumnya, Regulasi ini memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam program ini. Dengan adanya regulasi ini, semua tahapan pelaksanaan program dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar Bapak DI:

> "...Regulasi memberikan kerangka yang pasti dan jelas. Adanya perbup Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, menunjukan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan program ini. Juga memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiataan di lakukan dengan transparan dan sesuai dengan prosedur..." (Wawancara 25 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dokatakan bahwa Faktor pendukung merupakan elemen krusial yang menunjang implementasi Program Makan Rendang bagi UMKM di suatu daerah, memastikan program ini dapat berjalan lebih baik di masa

mendatang. Dalam implementasi Program Makan Rendang, terdapat faktor yang membuat pengelolaannya lebih mudah bagi pemerintah daerah. Yaitu adanya regulasi yang jelas, dengan dasar hukum terbaru yaitu Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022. Regulasi ini memberikan panduan dan kerangka kerja yang pasti bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, Bank Nagari dan Masyarakat. Regulasi ini memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai prosedur, transparan, dan teratur. Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah daerah juga terlihat melalui pengalokasian anggaran yang memadai, dan koordinasi yang baik antar instansi. Dengan adanya regulasi yang jelas ini diharapkan Program Makan Rendang dapat memberikan manfaat signifikan masyarakat terutama UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Faktor Penghambat

Masyarakat terlibat BI-Cheking

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluhan rencana pembiayaan produk skala mikro kecil dan mengah Ibuk RL:

> "...masih banyak dari pelaku UMKM yang tidak dapat memanfaatkan program makan rendang ini di sebabkan karna banyak dari masyarakat kita terlibat pada kredit macet atau BI-*cheking* Yang pernah di lakukan sebelunya. Hal ini snagat di sayangkan karna program ini sangat membatu para pelaku UMKM. Dan sampai saat ini belum ada solusi terhadap BI-*cheking* ini selain harus melunasi terlebih dahulu hutang bank lain maupun pinjaman *online* yang menunggak..." (wawancara 26 Agustus 2024)

Hal yang sama juga sampaikan oleh perwakilan masyarakat, yang menyoroti bahwa BI-*cheking* menjadi kendala dari program makan rendang ini. Kedua informan mengungkapkan, walaupun program ini sangat bermanfaat, tapi masih ada dari UMKM yang belum bisa memanfaatkan program ini. BI-*cheking* menyebabkan tidak semua UMKM yang membutuhan batuan untuk terlepas dari rentenir bisa memanfaatkan program Makan Rendang sebagaimana diungkapkan oleh masyarakat Ibuk Mike Lestari sebagai berikut:

> "...saya pribadi sudah tiga kali mengajukan permohonan untuk pemanfaatan program ini, tetapi hingga sekarang masih belum berhasil karna saya terkendala Bicheking pada bank lain. Walaupun saya sudah melunasi kredit tersebut tapi saya tetap belum bisa memanfaatkan program ini." (wawanacar 3 September 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa BI-*cheking* menjadi salah satu faktor penghambat. Banyak UMKM yang belum dapat menikmati layanan ini secara maksimal, sehingga terjadi ketidak merataan dalam penerapan Program Makan Rendang. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat meski program ini sangat bermanfaat, kredit macet membuat tidak semua UMKM yang membutuhkan bisa memanfaatkannya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menetapkan target jumlah biaya anggran selama program ini berlangsung. Namun, perlu adanya soslusi untuk BI-*cheking* itu sendiri agar program dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak UMKM. Karena sejauh ini belum ada solusi dari pemerintah selain membayarkan kredit macet tersebut dan membersihkan nama selama dua tahun.

Program Makan Rendang belum Terialisasi Secara Maksimal

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang memiliki usaha mikro terlibat kepada rentenir yaitu Ibuk Nora sebagai berikut:

> "...saya sudah lama memijam kepada rentenir dari awal usaha warung saya ini ada. Dan saya tidak pernah mengikuti sosialisasi terkait dengan program makan rendang tersebut sehingga saya hanya mendengar sekilas dari orang yang berbelanja di warung saya. Alasan saya lebih memilih meminjam kepada rentenir karna lebih cepat di bandingkan harus meminjam ke bank..." (Wawancara 19 Juni 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh UMKM lainnya yaitu Ibu DS pada wawancara dnegan peneliti sebagai berikut:

> "...untuk saat ini yang dibutuhkan oleh UMKM adalah pinjamn modal karna banyak dari masyarakat disekeliling kita yang terjerat pada pinjaman yang bunganya relatif besar. Saya pribadi tidak begitu paham dengan adanya program makan rendang yang dibuat bapak bupati kita dan saya juga belum pernah mengikuti sosialisasi terkait Program Makan Rendang ini. jika Program ini bisa di manfaatkan oleh UMKM harusnya program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM terutama yang terjerat kepada rentenir ..." (Wawancara 19 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan UMKM dapat dilihat bahwa masih ada dari masyarkat yang belum mengetahui Program Makan Rendang. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialiasi yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap program Makan Rendang. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Tanah Datar Bapak DI beliau menyampaikan hal tersebut sebagai berikut:

> "... kami sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program ini. untuk saat ini kami sudah melakukan sosialisasi pada awal program ini di lundurkan dan tahun 2023 sampai 2024 kami telah melakukan sosialisasi hampir 14 kali dikecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.."(Wawancara 25 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak DI, kurangnya sosialisasi dan banyaknya dari masyarakat yang terkena kredit macet membuat program ini enggan untuk dimanfaatkan oleh mansyarakat ini dibuktikan dari dana yang di anggarkan belum terealisasi secara keseluruhan hal ini di perkuat dengan penjelasan dari Bapak Ziofky Pratama S.E sebagai

ADM Pembiataan Bank Nagari Syariah Batusangkar dalam wawancara bersama peneliti sebagai berikut:

> "...dana yang dianggarkan untuk program makan rendang ini sebanyak 18 miliar. Dan untuk saat ini sudah ada 195 unit UMKM yang sudah memanfaatkan program ini dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.728.000.000. banyak dari masyarakat yang terkendala karna Bi-*cheking* pada saat proses pemohonan pemanfatan Program Makan Rendang ini..." (Wawancara 29 Agustus 2024)

Dari hasil perjelasan beberapa informan diatas dapat di tarik kesimpulan bawasannya Program Makan Rendang sebagai program ungulan yang di luncurkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar ditujukan untuk meminimalisir ketergantungan UMKM terhadap rentenir, kenyataan program ini belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal kepada UMKM yang terlibat dengan rentenir. Karna kurangnya sosialisasi dan banyak dari masyarakat terkena BI-*cheking* membuat program ini tidak bisa dimanfatkan oleh semua UMKM yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kabupaten Tanah Datar tentang Penerapan Program Makan Rendang Sebagai Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam meminimalisir ketergantungan UMKM terhadap rentenir, dapat peneliti simpulkan bahwa Program Makan Rendang ini belum maksimal, karena masih ada kekurangan dalam beberapa hal seperti masih banyaknya dari masyarakat yang terkendala dengan BI-*cheking* dan minimnya sosialisasi yang diberikan kepada UMKM. Akibatnya, upaya pemerintah dalam mengurangi rentenir di Kabupaten Tanah Datar belum berhasil mencapai target yang diinginkan. Masih banyaknya dari masyarakat yang belum mengetahui program ini karna kurangnya sosialisasi yang diberikan, yang mengakibatkan banyak dari UMKM yang belum bisa merasakan manfaat progtam ini sepenuhnya.

Penerapan Program Makan Rendang Sebagai Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam meminimalisir ketergantungan UMKM terhada rentenir merupakan upaya yang komprehensif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Dengan memberikan pinjaman dalam bentuk modal usaha, dan yang mana Program ini juga berfokus pada UMKM agar tidak terjerat lagi kepada rentenir diharapkan dapat mengurai rentenir di Kabupaten Tanah Datar. Implementasi Program Makan Rendang Sebagai Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam meminimalisir ketergantungan UMKM terhadap rentenir ini belum berhasil sepenuhnya untuk menghilangkan rentenir yang berada di Kabupaten Tanah Datar dikarenakan belum seluruh UMKM dapat merasakan manfaat program ini dan belum terealisasinya seluruh angaaran dari program unggulan ini. Adapun faktor terkait

belum terlaksana program Makan Rendang di Kabupaten Tanah Datar antara lain banyak dari masyarakat yang masih terkendala dengan BI-*Cheking*, Kurangnya sosialisasi yang diberikan sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu dengan program ini

REFERENSI

Asrinaldi, Reni, S. (2021). *Analisa Strategi Bprs Haji Miskin Menanggulangi Keputusan Pedagang Pasar Lima Kaum Melakukan Pinjaman Melalui Rentenir*. Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan) Volume 6, Nomor 2.

Eko, N., Karunia A.M. (2019*) Upaya pemberantasan rentenir di Dusun Soka, Ngoro oro Gunung Kidul*, Jurnal Pemberdayaan:Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3, No. 1, April 2019, Hal. 91-96

Eya, Z., F., Afifudin, & Siti, A., A. (2022). *Dukungan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Peningkatan Kinerja UMKM di Kabupaten Pringsewu* (Studi Kasus Pada BMT NU Pringsewu). El-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal Vol. 3, No. 2.

Hesti, N., Sotya, P., E. (2021) *Ketergantungan Pelaku Usaha Mikro Terhadap Rentenir Di Pasar Rakyat Prembun.* Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 Nomor 3.

Mardiana, S., Prima, S., & Fitroh, A. (2023) *Upaya Pemberantasan Rentenir Melalui Pembekalan Akses Pembiayaan Kur (Kredit Usaha Rakyat) Pada Umkm Di Sriharjo, Imogiri, Bantul*, Selaparang. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan. Volume 7, Nomor 2

Moh, Z. A., dan Sutrisni. (2013). *Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Di Kabupaten Sumenep*. Jurnal "PERFORMACE" Bisnis & Akuntansi Volume III, No.2.

Nurul, F., H., & Makrifatul, l. (2002). *Upaya Pemberantasan Praktik Riba di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo*. AL Maqashid : Journal of Economics and Islamic Business ISSN(e) 2775-8931| Vol. 02 No. 01 (April, 2022) |p. 21-32.

Putri, S., F., & Muliawati. (Mei 2022). *Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Memberantas Rentenir Di Kota banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 7 Nomor 2.

Peraturan gubernur Nomor 22 tahun 2022 tentang program unggul menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja pertahun.

Surat Keputusan Bupati Tanah Datar No. 500/196/PEREK DAN SDA-2021 tanggal 3 Juni 2021, tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)

Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban Pemberian Subsidi Bunga dan atau Subsidi Margin kepada Pelaku Usaha Mikro

Surat Bupati Tanah Datar No. 500/141/Pereko-SDA/2022 tanggal 8 Februari 2022, tentang Pelaksanaan Program Subsidi Bunga dan/atau Margin, serta Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kopreasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar dengan PT. Bank Nagari